

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang membahas hubungan antara dua belah pihak yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam suatu perusahaan. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Alchian dan Demset pada tahun 1972, kemudian diperluas oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bagaimana kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan. Jensen & Meckling (1976) berpendapat bahwa dalam teori keagenan akan terjadi konflik antara pemilik dan agen. Menurut Satria (2022) dalam teori keagenan konflik keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan agen serta menyebabkan *agent* akan bertindak tidak sesuai kepentingan *principal*.

Studi literatur Sutisna *et al.*, (2024) menyebutkan konflik yang terjadi antara pemilik dan manajemen terjadi karena pemilik cenderung memprioritaskan keinginannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam keadaan *going concern*, sementara *agent* lebih fokus pada kesejahteraan dalam pengelolaan atau tujuan jangka pendek. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa agen lebih mementingkan keuntungan pribadi seperti jabatan, gaji, dan bonus daripada kepentingan pemilik perusahaan. Menurut Ulfa and Citradewi (2023) dalam teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan mempersulit terjalinnya hubungan yang baik antara *principal* dan *agent*. Oleh karena, itu dalam teori keagenan sangat dibutuhkan perancangan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dan agen guna mencapai tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut (Eisenhardt, 1989) teori keagenan didasarkan pada 3 asumsi, yaitu berkaitan dengan karakter manusia, struktur organisasi, dan informasi. Ketiga asumsi tersebut menjadi landasan teori keagenan dalam menjelaskan hubungan

antara pemilik dan agen. Hal tersebut juga relevan dengan topik akuntansi saat ini seperti independensi dewan komisaris, *company size* dan *growth opportunity*. Dalam penelitian ini investor atau pemegang saham berperan sebagai *principal*, sedangkan pihak agen adalah karyawan atau manajemen perusahaan yang diberi mandat untuk mengelola tata perusahaan dengan penuh kehati-hatian (*prudence*).

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen yang dapat menyebabkan konflik (Rohmansyah & Soenaryo, 2019). Dalam teori keagenan terdapat asimetris informasi antara pemegang saham dan manajemen dimana *principal* memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi mengenai perusahaan, sedangkan *agent* memiliki akses untuk mengenai informasi lebih dalam terkait perusahaan. Perbedaan asimetris informasi tersebut dapat mempengaruhi kualitas laba yang terdapat pada laporan keuangan (Meisy & Mayangsari, 2022). Pemegang saham atau investor sering kali menginginkan laba agar terlihat tidak terlalu besar untuk menghindari pajak yang besar. Sedangkan manajemen perusahaan menginginkan laba yang terlihat besar untuk menunjukkan bahwa manajemen memiliki kinerja yang baik serta ingin memperoleh imbalan bonus yang tinggi (Tafaib & Mulia, 2024). Tentunya kedua perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan konflik antara pemegang saham dan manajemen.

Penerapan *accounting prudence* sangat diperlukan dalam proses pengelolaan perusahaan terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya penerapan prinsip *accounting prudence*, diharapkan mampu mencegah tindakan manajemen dalam memanipulasi informasi pada laporan keuangan karena *accounting prudence* mendorong manajemen untuk berhati-hati dalam melakukan penyusunan laporan. Dalam teori keagenan, pengawasan yang efektif dari dewan komisaris independen mampu mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham dan investor. Dewan komisaris independen harus memastikan bahwa manajemen harus berhati-hati dalam pengelolaan perusahaan, terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan guna meminimalkan manipulasi laba sehingga dapat menjaga kepercayaan investor.

Dalam perusahaan besar, terdapat pemisahan yang lebih jelas antara pemilik dan manajemen sehingga penerapan *accounting prudence* sangat penting agar manajemen tidak mengambil risiko yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Kemudian perusahaan dengan *growth opportunity* yang tinggi, sering kali memiliki potensi keuntungan yang besar sehingga risiko yang dialami akan lebih besar. Namun, dalam teori keagenan menyatakan bahwa manajemen mungkin akan mengejar *growth opportunity* untuk kepentingan pribadi seperti bonus yang besar. Di sinilah prinsip *accounting prudence* harus diterapkan agar manajemen dapat melaporkan keuntungannya dengan lebih berhati-hati.

2.2 Accounting Prudence

2.2.1 Definisi Accounting Prudence

Sejak 1 Januari tahun 2012, Indonesia telah melakukan adopsi penuh *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sehingga mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Proses ini telah dimulai dari tahap adopsi pada tahun 2008-2010 kemudian pada tahun 2011 memasuki tahap persiapan akhir dan diimplementasikan pada tahun 2012 (Yusera, 2021). Seiring dengan diberlakukannya konvergensi IFRS, konsep konservatisme kini dialihkan menjadi konsep *prudence*. Perbedaan *Prudence* dengan konsep konservatisme terletak pada prinsip pengakuannya (Heryadi & Agustina, 2023). Dalam konsep konservatisme, pendapatan dan laba diakui ketika benar-benar sudah terealisasi, sedangkan kerugian segera diakui. Namun dalam *prudence*, ketika terjadi pendapatan dan laba maka beban dan kewajiban yang harus segera diakui jika kondisinya sudah memenuhi pengakuan pendapatan. Sehingga dengan prinsip *prudence* dapat dijadikan sebagai solusi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan (Khasanah & Henny, 2023).

International Financial Reporting Standar (IFRS) mendefinisikan *prudence* sebagai prinsip yang mengatur bagaimana perusahaan mengakui serta mengukur aset, laba, dan liabilitas dengan penuh kehati-hatian. Definisi resmi dari *accounting prudence* terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial*

Accounting Statement Board) yang mengartikan *accounting prudence* sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. *Accounting Prudence* merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang dibutuhkan perusahaan dalam menentukan setiap nilai yang terdapat pada laporan keuangan, sehingga nilai-nilai tersebut dapat dipertanggung jawabkan (Mubarok *et al.*, 2022). *Accounting Prudence* merupakan prinsip kehati-hatian terhadap ketidakpastian di masa depan dengan cara memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan beban, menurunkan penilaian terhadap aktiva, dan menaikkan penilaian utang untuk mengurangi optimisme yang berlebihan dari manajemen dan pemilik perusahaan (Rifq & Sasongko, 2023). Dapat disimpulkan bahwa *accounting prudence* merupakan sikap kehati-hatian yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan untuk menghadapi ketidakpastian.

Dalam implementasinya saat ini, penerapan prinsip *accounting prudence* masih menuai pro dan kontra baik di kalangan akademisi, praktisi, maupun regulator. Di satu sisi, prinsip ini dianggap sebagai kendala terhadap kualitas laporan keuangan karena dianggap dapat mengurangi relevansi terkait informasi yang disajikan. Dengan memperlambat pengakuan laba dan meningkatkan pencadangan terhadap potensi kerugian yang mungkin terjadi, maka laporan keuangan mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Namun di sisi lain, prinsip *accounting prudence* justru dianggap sebagai alat penting untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan serta mampu mencegah manajemen dari tindakan yang bisa merugikan perusahaan. Meskipun prinsip ini menuai perdebatan pro dan kontra, prinsip *accounting prudence* tetap dijalankan sampai saat ini karena dinilai sebagai alat penting untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan dan mencegah manajemen dari tindakan oportunistik (Halimah *et al.*, 2021).

Prinsip *accounting prudence* mengharuskan perusahaan untuk selalu hati-hati dalam mengakui dan mengukur aset, persediaan, pendapatan, beban serta laba karena aktivitas ekonomi dan bisnis suatu perusahaan dilengkapi dengan ketidak

pastian yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan (Pulungan, 2019). Perusahaan tidak boleh terburu-buru dalam melaporkan pendapatan, namun harus lebih cepat dalam mengakui beban dan kerugian yang mungkin terjadi. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dengan demikian akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena laporan keuangan perusahaan disajikan secara transparan dan terhindar dari unsur manipulasi.

2.2.2 *Accounting Prudence* dalam PSAK

PSAK sebagai standar Pencatatan Akuntansi di Indonesia memiliki perang penting dalam penerapan prinsip *accounting prudence*. Pengakuan prinsip *accounting prudence* dalam PSAK tercermin dengan adanya beberapa pilihan metode pencatatan dalam kondisi yang sama. Hal tersebut menyebabkan perbedaan angkut-angkut dalam laporan keuangan sehingga akan menyebabkan laba yang *prudence*. Beberapa pilihan metode dalam PSAK berdasarkan Savitri (2016) dalam bukunya yaitu :

1. PSAK No. 14 tentang Persediaan yang menyatakan bahwa persediaan dalam neraca disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. *Prudence* dalam hal ini menggambarkan bahwa penyajian nilai persediaan harus hati-hati dan tidak membesar-besarkan nilai aset persediaan. Perusahaan dapat mencatat biaya persediaan menggunakan salah satu metode seperti *first in first out* (FIFO) atau rata-rata tertimbang.
2. PSAK No. 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan ketika menggunakan aktiva serupa. Estimasi masa manfaat harus diteliti secara periodik dan ketika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang harus dilakukan. Dengan standar ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan mampu mendorong timbulnya laba yang *prudence*.

3. PSAK No. 19 tentang Aset Tidak Berwujud berkaitan dengan metode amortisasi yang menyatakan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.
4. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan yang menyatakan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan.
5. PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset yang menyatakan perusahaan harus segera mengakui kerugian yang mungkin terjadi pada aset yang mengalami penurunan nilai, sehingga laporan keuangan yang disajikan menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Dengan adanya berbagai pilihan metode tersebut akan mempengaruhi angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan secara tidak langsung penerapan konsep *prudence* akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan.

2.2.3 Manfaat Accounting Prudence

Penerapan prinsip *accounting prudence* memiliki manfaat yang dapat membantu perusahaan dalam menjaga transparansi dan integritas laporan keuangan. Berikut beberapa manfaat dari penerapan prinsip *accounting prudence* menurut (Watts, 2002) :

1. Menghindari Overstatement Aset dan Laba

Dengan prinsip *prudence* mengharuskan perusahaan untuk tidak berlebihan dalam menyajikan nilai aset dan laba. Perusahaan diharuskan untuk menyajikan nilai dengan penuh hati-hati dan sesuai kondisi perusahaan agar terhindar dari memberikan informasi yang terlalu tinggi atau optimis kepada investor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

2. Meningkatkan Kepercayaan Investor

Penerapan prinsip *accounting prudence* akan membantu meningkatkan kepercayaan investor karena laporan keuangan yang disusun dengan prinsip

prudence lebih akurat dan realistis. Investor akan lebih tertarik dengan perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dengan penuh hati-hati dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian menghindari overstatement pendapatan dan aset serta understatement kewajiban dan beban. Dengan demikian, laporan keuangan lebih akurat dan transparan, yang memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang valid.

3. Menghindari Manipulasi Laporan Keuangan

Prinsip *accounting prudence* mengharuskan perusahaan untuk mengakui beban dan kerugian lebih awal dan tidak ada nilai aset serta pendapatan yang dilebih-lebihkan sehingga dapat memastikan laporan keuangan yang disajikan lebih transparan. Dengan demikian perusahaan akan terhindar dari praktik manipulasi laporan keuangan yang dapat menurunkan citra perusahaan dan kepercayaan investor.

4. Meningkatkan Kualitas Laba

Penerapan prinsip *accounting prudence* dapat meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan dengan memastikan bahwa perusahaan mengadopsi pendekatan konservatif dalam pencatatan pendapatan dan beban. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk mengakui kerugian dan kewajiban lebih awal, sementara pengakuan pendapatan dilakukan hanya jika benar-benar terealisasi. Dengan demikian, laba yang dilaporkan tidak mengalami overstatement, yang dapat memberikan persepsi yang lebih realistis mengenai kondisi keuangan perusahaan..

5. Mengurangi Risiko Litigasi

Dengan prinsip *accounting prudence*, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangannya, sehingga mengurangi kemungkinan menghadapi tuntutan hukum terkait pelaporan yang tidak akurat atau menyesatkan. Prinsip ini mencegah perusahaan dari overstatement pendapatan dan aset, serta memastikan kewajiban dan beban dicatat secara wajar. Dengan demikian, perusahaan lebih terlindungi dari tuntutan hukum terkait pelaporan yang tidak akurat atau menyesatkan.

2.2.4 Jenis *Accounting Prudence*

Berdasarkan penelitian Liyanto & Anam (2019) menjelaskan bahwa *accounting prudence* dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. *Accounting Prudence* tak bersyarat (*Unconditional Conservatism*)

Accounting Prudence tak bersyarat adalah prinsip dalam akuntansi yang secara konsisten diterapkan tanpa bergantung pada kondisi tertentu. Dalam praktiknya, prinsip ini cenderung menghasilkan pencatatan nilai aset yang lebih rendah dari nilainya yang sebenarnya. Dengan kata lain, metode ini secara hati-hati menilai aset agar tidak terlalu optimistis, bahkan jika tidak ada bukti risiko kerugian yang nyata. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehati-hatian dalam pelaporan keuangan perusahaan secara jangka panjang.

b. *Accounting Prudence* bersyarat (*Conditional Conservatism*)

Konservatisme bersyarat adalah prinsip yang lebih fleksibel, bergantung pada kondisi tertentu, dan sering kali merujuk pada pendekatan konservatif yang mengatakan, “akui kerugian secepat mungkin, tetapi hanya akui keuntungan jika sudah benar-benar pasti.” Prinsip ini memastikan bahwa kerugian langsung diungkapkan dalam laporan keuangan begitu teridentifikasi, sementara keuntungan baru dicatat ketika sudah terjadi atau terealisasi. Dengan cara ini, pelaporan keuangan menjadi lebih berhati-hati dan mencegah perusahaan memberikan gambaran yang terlalu optimistis terhadap kinerjanya.

2.2.5 Pengukuran *Accounting Prudence*

Beberapa peneliti telah mengajukan berbagai metode untuk mengukur *accounting prudence* dan terdapat tiga pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur *accounting prudence* yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual Measure*, dan *Net Asset Measure* berdasarkan Savitri (2016) dalam bukunya yaitu :

1. *Earning/Stock Relation Measure*

Earning/Stock Relation Measure juga dikenal sebagai *Price to Earning (P/E) Ratio* yang merupakan salah satu metode pengukuran *accounting prudence* dengan melibatkan perbandingan antara harga saham sebuah perusahaan

dengan laba per saham. Metode ini mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana investor menilai kemampuan laba perusahaan dibandingkan dengan harga di pasaran.

2. *Earning/Accrual Measure*

Savitri, (2016) mendeskripsikan terdapat beberapa model pengukuran dalam *earning/accrual measure*.

a. Model Givoly dan Hayn (2000)

Dalam literatur Fatimah & Rahmah (2022) menjelaskan bahwa pengukuran *accounting prudence* menggunakan akrual yaitu selisih antara laba bersih dan arus kas yang memfokuskan efek *accounting prudence* pada laporan laba rugi selama beberapa periode. Mereka berpendapat bahwa *accounting prudence* menghasilkan akrual negatif secara terus menerus. Akrual yang dimaksud yaitu selisih antara laba bersih sebelum depresiasi dengan arus kas dari aktivitas operasi. Perhitungan akrual dibagi menjadi dua yaitu :

1) *Operating Accrual*

Operating accrual mencakup perubahan dalam aset lancar, kas bersih dan investasi jangka pendek dikurang dengan perubahan dalam aset lancar dan utang jangka pendek. Rumus ini menggambarkan perbedaan antara laba akuntansi dengan arus kas dari aktivitas operasi.

2) *Non Operating Accrual*

Rumus ini mengukur antara jumlah keseluruhan akrual yang berasal dari perhitungan laba akuntansi dengan arus kas dikurang akrual yang terkait dengan aktivitas operasi inti.

b. Model Zhang (2007)

Zhang (2007) menggunakan *conv_accrual* sebagai salah satu pengukuran *prudence*. *Conv_accrual* didapatkan dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk yang terjadi dalam perusahaan, contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset.

3. *Net Asset Measure*

Salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengetahui *prudence* yaitu dari nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Pengukuran ini menggunakan *raiso market to book value of equity* yang menggambarkan nilai pasar ekuitas perusahaan (Fatimah & Rahmah, 2022).

Namun secara lebih spesifik, maka berikut ini merupakan pengukuran yang sering digunakan dalam menghitung tingkat *prudence*.

a. Model Basu (1997) *asymmetric timeliness of earning measure* (AT).

Menurut Basu (1997) *prudence* diukur dengan pendekatan reaksi pasar atas informais yang diungkapkan perusahaan. Konservatisme diukur dengan cara membentuk regresi antara return saham terhadap laba (Basu, 1997).

b. Ball dan Shivakumar (2005) *asymmetric cash flow to accruals measure* (AACF). Pengukuran ini bertujuan untuk menghitung akrual dengan mempertimbangkan sifat asimetris dari arus kas operasional.

c. Penman dan Zhang (2002) *Hidden Reserves Measure* (HR). Perhitungan ini bertujuan untuk mengukur nilai cadangan tersembunyi dalam laporan keuangan perusahaan. Cadangan tersembunyi adalah nilai aset atau laba yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam laporan keuangan, sering kali karena aset dinilai lebih rendah dari nilai pasar atau kewajiban dinilai lebih tinggi dari yang sebenarnya.

d. Givolyn dan Hayn (2000) *Conservatism Based On Accrued Items*. Rumus ini menghitung konservatisme laba dengan mempertimbangkan laba operasional, depresiasi, dan arus kas operasi.

e. Besaran Akrual (Dikembangkan oleh Givoly dan Hayn 2002). Rumus ini menghitung selisih antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, rumus ini membantu dalam menilai seberapa konservatif laporan laba yang disajikan oleh perusahaan.

2.3 Independensi Dewan Komisaris

2.3.1 Definisi Independensi Dewan Komisaris

Independensi merupakan prinsip tidak mudah terpengaruh atau tidak memihak kepada siapa pun. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/2014 menyatakan Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, satu (1) di antaranya adalah komisaris independen. Dewan komisaris yang independen adalah anggota dewan komisaris yang bertindak bebas dan adil demi kepentingan perusahaan serta tidak memiliki hubungan profesional dengan anggota lain (Meisy & Mayangsari, 2022). Penelitian Saragih & Rohman (2019) juga menjelaskan bahwa dewan komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya dan mampu bertindak demi kepentingan umum perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan salah satu anggota yang dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang berfungsi untuk mengawasi jalannya tata kelola perusahaan.

Dewan komisaris independen memiliki tugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik serta memastikan bahwa perusahaan telah memperlakukan pemegang saham minoritas dengan jujur dan adil (Rajagukguk & Rohman, 2020). Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta memastikan pengawasan yang objektif terhadap manajemen perusahaan. Dengan adanya komisaris independen, perusahaan dapat terhindar dari benturan kepentingan serta menjaga transparansi. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para investor terhadap perusahaan.

Anggota dewan komisaris eksternal memiliki pengalaman luas dalam dunia bisnis dan keuangan, sehingga mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas terkait proses pelaporan keuangan. Pengalaman mereka sebagai pejabat senior di perusahaan lain memberikan wawasan yang berharga dalam memastikan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai standar pelaporan yang berlaku. Dewan komisaris independen tidak hanya bertindak sebagai pengawas independen terhadap keputusan

manajemen, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih objektif dalam menilai transparansi laporan keuangan. Dengan latar belakang yang kuat dalam mengawasi pelaporan keuangan dan praktik bisnis, dewan komisaris independen dapat membantu memastikan bahwa manajemen perusahaan menerapkan prinsip *accounting prudence* secara konsisten guna mengurangi potensi manipulasi laporan keuangan serta mencegah adanya *overstatement* terhadap kinerja keuangan perusahaan (Maulana *et al.*, 2023).

2.3.2 Tantangan dalam Implementasi Independensi Dewan Komisaris

Peran Dewan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan menjadi sangat penting. Namun, perusahaan masih sering menghadapi tantangan dalam implementasinya, di antaranya yaitu :

1. Adanya Keterbatasan Akses Informasi

Komisaris Independen sering kali bergantung pada informasi yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut dapat membatasi efektivitas pengawasan komisaris independen jika informasi yang diberikan tidak lengkap. Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur bahwa komisaris independen yang menjadi ketua komite audit harus memastikan akses terhadap informasi yang relevan dan memadai untuk melaksanakan tugasnya. Dengan demikian sangat dibutuhkan informasi yang relevan dan memadai guna memastikan efektivitas pengawasan komisaris independen.

2. Kualitas dan Kompetensi Rendah

Rendahnya kualitas dan kompetensi yang dimiliki komisaris independen menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan karena tidak semua komisaris independen memiliki kompetensi yang memadai untuk memahami kompleksitas operasional dan strategi perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan komisaris independen yang memiliki kompetensi memadai sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014, komisaris independen harus memiliki latar belakang, pengalaman, dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan mereka.

3. Adanya Konflik Kepentingan yang Terselubung

Seorang komisaris independen haruslah bersikap independen dan tidak memihak. Namun, meskipun disebut independen terkadang masih ada potensi hubungan tersembunyi antara komisaris atau pihak tertentu yang dapat mempengaruhi independensi mereka. Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dijelaskan bahwa komisaris independen harus memastikan pengungkapan yang jelas untuk mencegah benturan kepentingan.

4. Kultur Perusahaan

Dalam implementasinya, kultur perusahaan terkadang dapat menghambat efektivitas komisaris independen karena kultur perusahaan yang kurang mendukung transparansi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merekomendasikan penciptaan budaya tata kelola yang transparan untuk mendukung fungsi dewan komisaris independen

2.3.3 Fungsi Independensi Dewan Komisaris

Fungsi dewan komisaris independen sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mencakup beberapa aspek yaitu :

1. Mengawasi dewan direksi dalam menjalankan tata kelola perusahaan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan kepentingan perusahaan dan para pemegang saham. Komisaris independen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh direksi harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan jangka panjang perusahaan.
2. Melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, investor, *stakeholder*, serta perusahaan itu sendiri. Komisaris independen bertugas untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan tidak hanya menguntungkan pihak mayoritas, tetapi juga melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

3. Dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam mendorong transparansi, termasuk dalam hal laporan keuangan dan keputusan strategis perusahaan. Mereka memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Komisaris independen bertugas memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari OJK maupun otoritas terkait lainnya. Komisaris independen memastikan bahwa manajemen perusahaan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk transparansi laporan keuangan, perlindungan hak pemegang saham, serta kepatuhan terhadap standar etika bisnis.
5. Memberikan penilaian terkait strategi bisnis yang telah diajukan oleh direksi seperti rencana kerja, estimasi anggaran tahunan, dan kebijakan dalam pengendalian risiko. Dengan melakukan penilaian yang objektif, komisaris independen dapat memastikan bahwa strategi bisnis yang akan dijalankan tidak hanya sejalan dengan visi dan misi perusahaan, tetapi harus realistis dan bisa diimplementasikan secara efektif.

2.3.4 Ciri-ciri Independensi Dewan Komisaris

Berikut merupakan karakteristik yang wajib dimiliki oleh dewan komisaris independen :

1. Tidak Memiliki Hubungan Afiliasi
Seusi regulasi POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris bahwa komisaris independen harus bebas dari hubungan yang dapat mempengaruhi independensinya. Komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris lainnya.
2. Tidak Memiliki Kepemilikan Saham
Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen tidak diperbolehkan memiliki saham lebih dari 5% di perusahaan tempat mereka menjabat. Jika seorang komisaris

independen memiliki saham lebih dari 5%, maka kepemilikan ini harus dilaporkan kepada OJK dan diungkapkan dalam laporan perusahaan.

3. Tidak Terlibat dalam Operasional Perusahaan

Dewan komisaris independen tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Fungsi mereka adalah mengawasi dan memberikan rekomendasi strategis kepada direksi tanpa turut serta dalam pengelolaan bisnis sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga independensi dalam pengawasan. Hal tersebut diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014 yang menjelaskan fungsi pengawasan, tidak ikut serta dalam operasional perusahaan.

4. Bebas dari Konflik Kepentingan

Dewan komisaris yang independen harus bebas dari segala konflik kepentingan. Hal tersebut diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 24 yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen harus terbebas dari hubungan yang dapat mempengaruhi independensinya, baik hubungan pribadi, bisnis, atau kepentingan dengan perusahaan atau pihak tertentu.

5. Berintegritas dan Berpengalaman

Dewan komisaris independen harus memiliki integritas yang baik serta pengalaman yang mumpuni di bidangnya. Hal tersebut diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 25 yang menyatakan bahwa komisaris independen harus memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan guna mendukung tugas dan wewenangnya. Kemudian integritas yang tinggi juga menjadi syarat penting guna menjamin kepercayaan para *stakeholder*.

6. Kemampuan Melakukan Pengawasan Terhadap Risiko Perusahaan

Dewan komisaris independen harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap risiko yang akan dialami perusahaan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 26 yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi manajemen risiko dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisnis.

2.5.4 Tantangan Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen memainkan peran penting dalam memastikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan. Mereka bertugas mengawasi kinerja direksi, memberikan saran strategis, serta melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Lutfiany *et al.*, 2022). Namun, dalam menjalankan tugasnya, komisaris independen sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas peran mereka. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh komisaris independen:

1. Keterbatasan Akses Terhadap Informasi

Komisaris independen bertugas mengawasi kinerja perusahaan dan memastikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Namun, dalam menjalankan perannya, mereka sering menghadapi tantangan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan secara efektif. Karena komisaris independen tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, sehingga mereka hanya memperoleh informasi dari laporan yang disajikan oleh direksi dan manajemen. Jika manajemen tidak transparan atau hanya memberikan informasi yang menguntungkan bagi kepentingan mereka, komisaris independen bisa mengalami kesulitan dalam mendapatkan gambaran yang akurat tentang kondisi perusahaan.

2. Potensi Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh komisaris independen dalam menjalankan tugas pengawasannya. Konflik ini muncul ketika kepentingan pribadi, hubungan profesional, atau tekanan eksternal memengaruhi objektivitas dan independensi komisaris dalam mengambil keputusan. Komisaris independen seharusnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pemegang saham atau direksi, tetapi dalam beberapa kasus, mereka memiliki hubungan bisnis, profesional, atau pribadi dengan salah satu pihak di dalam perusahaan. Jika seorang komisaris independen memiliki kedekatan dengan pemegang saham mayoritas, ada kemungkinan ia lebih cenderung mendukung kebijakan yang menguntungkan pemegang saham tersebut, meskipun keputusan tersebut tidak selalu terbaik bagi perusahaan.

secara keseluruhan. Hubungan ini dapat menyebabkan komisaris independen kurang kritis dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan yang seharusnya bersifat objektif.

3. Keterbatasan Wewenang dalam Mengambil Keputusan

Komisaris independen memiliki peran utama dalam mengawasi dan memberikan masukan strategis bagi direksi perusahaan. Namun, dalam praktiknya, mereka sering menghadapi keterbatasan wewenang dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat mengurangi dan mencegah potensi penyimpangan dalam operasional perusahaan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, komisaris independen hanya berfungsi sebagai pengawas dan tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Mereka tidak memiliki hak untuk menjalankan strategi bisnis, mengelola sumber daya perusahaan, atau mengeksekusi keputusan keuangan, yang semuanya merupakan tanggung jawab direksi. Akibatnya, meskipun komisaris independen dapat mengidentifikasi potensi risiko atau ketidakefektifan kebijakan perusahaan, mereka tetap tidak dapat langsung melakukan intervensi untuk memperbaiki situasi.

4. Tekanan dari Manajemen dan Pemegang Saham Mayoritas

Komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan bahwa manajemen serta dewan direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Namun, dalam praktiknya, mereka sering kali menghadapi tekanan dari manajemen dan pemegang saham mayoritas, yang dapat menghambat independensi mereka dalam menjalankan pengawasan. Meskipun komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan dan kinerja perusahaan, mereka sering kali menghadapi campur tangan dari manajemen atau pemegang saham mayoritas dalam menjalankan perannya. Beberapa pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi keputusan dewan komisaris, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan bisnis pribadi atau

kelompok tertentu. Jika komisaris independen mencoba untuk mengambil sikap tegas terhadap kebijakan yang dianggap berisiko atau tidak sesuai dengan GCG, mereka dapat mengalami tekanan untuk mengubah atau menarik kembali rekomendasinya.

5. Keterbatasan dalam Mengawasi Kepatuhan terhadap Regulasi

Komisaris independen memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal, standar akuntansi, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Namun, dalam praktiknya, mereka sering menghadapi keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Salah satu kendala utama adalah kurangnya akses terhadap informasi yang cukup dan akurat untuk menilai kepatuhan perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, peraturan yang sering berubah atau kompleks dapat menyulitkan komisaris independen dalam memahami dan menegakkan kepatuhan secara efektif. Keterbatasan lainnya adalah minimnya wewenang eksekutif, sehingga meskipun komisaris independen dapat memberikan rekomendasi terkait pelanggaran, mereka tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengambil tindakan korektif. Dalam beberapa kasus, manajemen perusahaan juga bisa saja kurang kooperatif atau menunda tindakan yang disarankan, terutama jika kepatuhan terhadap regulasi bertentangan dengan kepentingan bisnis jangka pendek. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan komisaris independen dalam aspek kepatuhan, diperlukan mekanisme yang lebih ketat, seperti peningkatan transparansi informasi, dukungan dari komite audit, serta kolaborasi dengan otoritas regulator guna memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.3.5 Pengukuran Independensi Dewan Komisaris

Pengukuran independensi dewan komisaris dilakukan untuk mengetahui tingkat independensi dan efektivitas dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Pengukuran yang sering digunakan yaitu menghitung proporsi komisaris independen dengan membagi antara jumlah

komisaris independen dan seluruh jumlah komisaris independen dalam perusahaan (Liyanto & Anam, 2019). Besarnya skala dewan komisaris independen dalam perusahaan menunjukkan semakin besar pula potensi pengawasan yang objektif dan kritis terhadap pengelolaan keuangan. Komisaris independen memastikan pengawasan yang lebih baik bagi para pemegang saham karena mereka memerlukan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat diakui kebenarannya. Dewan yang memiliki banyak anggota independen cenderung mampu memastikan bahwa penerapan prinsip *accounting prudence* dalam perusahaan lebih ketat sehingga mampu mengurangi kemungkinan risiko manipulasi laporan keuangan atau pengambilan risiko yang berlebihan oleh manajemen (Lutfiany *et al.*, 2022).

2.4 Company Size

2.4.1 Definisi Company Size

Company Size atau biasa disebut dengan ukuran perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi nilai aset yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula nilai keuntungan suatu perusahaan (Abbas & Hidayat, 2022). Ukuran perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil (Rohmansyah, Soenaryo, 2019). Dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan merupakan indikator yang dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek seperti total aset, pendapatan, jumlah karyawan, serta kapasitas pasar.

Perusahaan yang memiliki skala besar, cenderung memiliki sumber daya yang besar serta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi risiko perusahaan. Pemahaman mengenai ukuran perusahaan dapat membantu manajemen perusahaan dalam merancang strategi yang tepat. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan meningkatkan citra baik perusahaan sehingga investor akan lebih percaya kepada perusahaan besar karena stabilitas yang dimiliki sudah baik. Selain itu, Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kompleks dan formal dibandingkan perusahaan kecil. Dengan pengendalian

internal yang lebih baik, perusahaan besar dapat lebih efektif dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, memastikan bahwa semua informasi keuangan dicatat secara akurat dan transparan.

Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki total aset yang lebih besar pula, sehingga perusahaan besar memiliki peluang tinggi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan besar mendorong mereka untuk berhati – hati dalam melaporkan aset, laba, ataupun kerugian yang mungkin dialami perusahaan. Kemudian perusahaan yang memiliki skala besar diharuskan untuk mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang lebih ketat dibandingkan perusahaan kecil. Namun bukan berarti perusahaan kecil tidak memiliki kewajiban dalam mematuhi regulasi tersebut. Setiap perusahaan memiliki kewajiban yang sama hanya saja perusahaan besar berada dalam pengawasan yang lebih ketat yang menuntut perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara rinci dan lebih akurat (Dewi & Budi N., 2023).

Selain itu, ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk strategi pendanaan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan eksternal, seperti pinjaman dari kreditor atau penerbitan saham di pasar modal sehingga mendorong perusahaan untuk menerapkan kehati – hatian. Tingginya tingkat kepercayaan dari investor serta lembaga keuangan terhadap perusahaan besar disebabkan oleh beberapa faktor seperti rekam jejak keuangan yang stabil, laporan keuangan yang transparan, serta tata kelola perusahaan yang lebih baik. Perusahaan besar juga memiliki sistem pengendalian internal yang lebih ketat sehingga risiko perusahaan untuk mengalami gagal bayar atau kebangkrutan lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu perusahaan besar cenderung memiliki kesempatan lebih untuk mendapatkan pinjaman dari kreditor yang dapat mendorong perusahaan untuk selalu berhati – hati dalam mengelola keuangan guna menjaga kepercayaan dari para kreditor (Kalbuana & Yuningsih, 2020).

2.4.2 Manfaat *Company Size*

Adanya ukuran perusahaan dapat memberikan berbagai manfaat strategis bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat dari adanya ukuran perusahaan berdasarkan penelitian (Loekito & Setiawati, 2021) :

1. Kemudahan Akses ke Pendanaan

Perusahaan besar cenderung memiliki kemudahan akses ke sumber pendanaan baik dari bank maupun investor. Karena perusahaan besar memiliki kinerja yang lebih stabil dan risiko kegagalan yang lebih rendah. Perusahaan besar memiliki struktur yang lebih kompleks sehingga perusahaan besar dianggap lebih mampu dalam menghadapi berbagai ketidakpastian pasar dan tantangan ekonomi. Hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan kepada kreditor dan investor untuk menyediakan modal karena perusahaan memiliki risiko kegagalan yang rendah.

2. Meningkatkan Kepercayaan dan Reputasi

Perusahaan besar akan dianggap memiliki reputasi lebih kuat di mata investor ataupun pemasok. Karena perusahaan besar sering kali memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mengimplementasikan strategi bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian investor akan lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki stabilitas dan terpercaya.

3. Manajemen Risiko yang Baik

Perusahaan besar cenderung memiliki cadangan finansial yang mampu membantu perusahaan dalam mengatasi risiko bisnis, seperti fluktuasi ekonomi. Cadangan finansial ini diperoleh dari pendapatan yang stabil dan memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi. Dengan cadangan finansial yang kuat, perusahaan besar memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dengan lebih baik.

4. Meningkatkan Inovasi

Ukuran perusahaan yang lebih besar memungkinkan investasi yang lebih besar dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang penting untuk inovasi dan

pengembangan produk baru. Ini membantu perusahaan untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif.

5. Kepatuhan terhadap Regulasi

Perusahaan besar sering memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi persyaratan regulasi dan kepatuhan. Dengan memiliki sistem kepatuhan yang baik, perusahaan besar mampu menghindari denda atau sanksi hukum yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan.

2.2.3 Klasifikasi *Company Size*

Berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, perusahaan diklasifikasikan menjadi dua bagian.

1. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah badan hukum yang memiliki jumlah kekayaan atau total aset tidak lebih dari Rp20 miliar, artinya perusahaan kecil memiliki kapasitas finansial yang terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar. Kemudian kepemilikan perusahaan kecil bukan merupakan afiliasi dan tidak dikendalikan oleh perusahaan yang bukan perusahaan menengah atau kecil karena kepemilikan perusahaan biasanya terbatas pada individu atau kelompok kecil saja tanpa afiliasi dengan perusahaan besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan. Selanjutnya perusahaan kecil tidak termasuk dalam kategori reksadana dan perusahaan kecil biasanya beroperasi pada tingkat lokal atau regional dengan pasar yang lebih terbatas. Selain itu, perusahaan kecil sering kali

2. Perusahaan Menengah/Besar

Perusahaan menengah/besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kategori ini mencakup usaha nasional (milik negara atau swasta) serta usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan besar memiliki kekayaan atau total aset di atas Rp20 miliar serta memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks. Perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang lebih besar, termasuk modal yang besar, teknologi yang canggih, serta tim manajemen yang profesional.

2.4.4 Pengukuran *Company Size*

Company Size sering kali diukur menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Pengukuran berdasarkan aset dikarenakan nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi atau penjualan dalam mengukur *company size* (Rohmansyah & Soenaryo, 2019). Pengukuran logaritma natural dari total aset sebagai pengukuran *company size* merupakan metode yang efektif guna memperoleh gambaran akurat tentang ukuran serta kekuatan finansial sebuah perusahaan. Selain itu, pengukuran *company size* menggunakan logaritma natural dari total aset juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi finansial perusahaan yang sesungguhnya. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula kapasitas perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip *accounting prudence* (Kalbuana & Yuningsih, 2020).

2.5 *Growth Opportunity*

2.5.1 Definisi *Growth Opportunity*

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, tentunya setiap perusahaan memiliki peluang untuk terus bertumbuh dan mengembangkan usahanya. Pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dari kesempatan dan peluang perusahaan untuk bertumbuh (*growth opportunity*). *Growth Opportunity* merupakan kesempatan sebuah perusahaan dalam menjalankan investasi kepada hal-hal yang bisa menguntungkan perusahaan (Tafaib & Mulia, 2024). Dapat disimpulkan bahwa *growth opportunity* merupakan kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kinerja jangka panjang.

Growth Opportunity merupakan aspek penting bagi perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis yang dapat membantu perusahaan untuk terus tumbuh dan mampu bersiang. Semakin tinggi peluang perusahaan untuk tumbuh maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan perusahaan. Besarnya dana yang dibutuhkan perusahaan mendorong manajer untuk menerapkan prinsip *accounting prudence* agar pendanaan untuk kebutuhan investasi dapat tercukupi, yaitu dengan meminimalkan laba Mubarak *et al.*, (2022). Perusahaan yang memiliki kesempatan untuk tumbuh

lebih tinggi akan lebih berhati-hati dalam mengelola laporan keuangan mereka. Ketika perusahaan memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan, manajemen harus mengambil keputusan investasi yang bijaksana. Prinsip kehati-hatian mendorong manajemen untuk mempertimbangkan risiko yang terkait dengan investasi, sehingga mereka tidak mengabaikan potensi kerugian yang mungkin timbul dari ekspansi yang tidak terencana (Melani, 2021).

Perusahaan yang sedang bertumbuh cenderung menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi, seperti fluktuasi pasar, kebutuhan untuk ekspansi, serta risiko operasional lainnya. Dalam kondisi ketidakpastian ini, prinsip *accounting prudence* menjadi sangat penting untuk menciptakan cadangan tersembunyi yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung investasi dan memperkuat fondasi bisnis perusahaan. Cadangan tersebut dihasilkan dari pengakuan biaya atau kerugian lebih cepat daripada pendapatan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, perusahaan yang memiliki cadangan ini lebih siap bertahan dan tidak perlu melakukan langkah-langkah yang dapat merugikan keberlangsungan operasional perusahaan seperti mengurangi jumlah karyawan atau mengurangi kualitas produk (Lutfiany *et al.*, 2022).

Perusahaan dengan *growth opportunity* yang tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih agresif dalam pelaporan keuangan, terutama dalam upaya meningkatkan daya tarik bagi investor dan kreditor. Namun, prinsip *accounting prudence* mengharuskan perusahaan untuk tetap berhati-hati dalam mencatat pendapatan dan beban agar tidak memberikan gambaran yang terlalu optimis. Perusahaan dengan *growth opportunity* tinggi mungkin tertarik untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang kurang konservatif guna memperlihatkan profitabilitas yang lebih baik. Jika tidak menerapkan *accounting prudence*, akan ada risiko *overstatement* laba, yang dapat menyesatkan dan merusak kepercayaan investor serta menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang (Valentina *et al.*, 2023).

2.5.2 Keuntungan Memanfaatkan *Growth Opportunity*

Perusahaan yang mampu menggunakan *growth opportunity* dengan baik akan memberikan beberapa keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan dengan strategi yang tepat agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Di bawah ini merupakan keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan *growth opportunity* (Miladia *et al.*, 2023).

1. Meningkatkan Pendapatan

Growth opportunity yang tinggi membuat perusahaan lebih menarik bagi investor karena prospek pertumbuhan laba di masa depan lebih besar. Perusahaan yang memanfaatkan *growth opportunity* dengan bijak mampu beradaptasi dengan pasar baru atau mengeluarkan produk baru yang dapat meningkatkan penjualan. Dengan meningkatnya penjualan, perusahaan mampu memperkuat posisi keuangannya serta dapat meningkatkan pendapatan.

2. Meningkatkan Citra Perusahaan

Perusahaan yang aktif mencari dan memanfaatkan *growth opportunity* dapat membangun citra positif di pasar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ketika perusahaan berhasil memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada, mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki visi yang jelas dan kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan yang mampu meningkatkan citra baik perusahaan.

3. Meningkatkan Daya Tarik Investor

Perusahaan yang memiliki *growth opportunity* yang baik akan lebih menarik bagi investor karena perusahaan dianggap memiliki potensi yang lebih besar untuk berkembang dan memperoleh keuntungan di masa depan. Hal tersebut membuat perusahaan lebih diminati oleh investor yang mencari investasi dengan potensi pertumbuhan yang tinggi sehingga dapat memberikan kemudahan untuk akses ke pendanaan yang mampu mendukung pertumbuhan perusahaan.

4. Meningkatkan Nilai Perusahaan

Memanfaatkan peluang pertumbuhan dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Investor cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap perusahaan yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat. Hal tersebut dapat meningkatkan harga saham dan nilai pasar perusahaan sehingga dapat menarik minat konsumen yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan

5. Meningkatkan Daya Saing Pasar

Growth opportunity atau peluang pertumbuhan adalah kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang, baik melalui inovasi, ekspansi pasar, atau peningkatan efisiensi operasional. Ketika sebuah perusahaan memiliki growth opportunity yang tinggi dan mampu memanfaatkannya dengan baik, daya saingnya di pasar akan meningkat.

2.5.3 Pengukuran *Growth Opportunity*

Growth Opportunity dalam perusahaan dapat diukur berdasarkan *market to book value of equity*, *price to book value*, *sales growth*, serta melihat total aset dalam perusahaan (Usbah & Primasari, 2020).

c. *Market to Book Value of Equity*

Growth opportunity dalam perusahaan dapat diukur dengan rasio *market to book value of equity*. Rasio dari *market to book value of equity* menggambarkan besarnya perbandingan antara nilai pasar saham dengan biaya ekuitas perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin besar pula kesempatan perusahaan untuk meningkatkan nilainya di masa depan. Semakin tinggi rasio dari *market to book value of equity* maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk terus bertumbuh dan meningkatkan nilai perusahaan di masa depan.

d. *Price to Book Value*

Growth Opportunity dalam perusahaan juga dapat diukur dengan rasio *price to book value* yang menggambarkan perbandingan harga pasar saham dengan nilai buku per lembar saham pada akhir periode laporan keuangan perusahaan.

Rasio ini sering digunakan sebagai indikator dari *growth opportunity* investor menganggap perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang baik sehingga investor cenderung bersedia membayar lebih tinggi untuk saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula harga saham perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi di masa depan.

e. *Sales Growth*

Pengukuran *growth opportunity* juga dapat dihitung dengan melihat pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dalam perusahaan. *Sales growth* menggambarkan peningkatan pendapatan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan menarik lebih banyak investor. Pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi tingkat akrual perusahaan seperti piutang, persediaan, dan lainnya.

f. *Total Asset*

Growth opportunity merujuk pada potensi perusahaan untuk tumbuh melalui investasi di masa depan. Pengukuran *growth opportunity* sering kali dilakukan melalui pertumbuhan total aset dengan menghitung perubahan total aset dari satu periode ke periode berikutnya Perusahaan dengan nilai aset yang tinggi biasanya memiliki kapasitas untuk melakukan investasi yang lebih besar. Ini menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih baik, karena perusahaan dapat memperluas operasional dan meningkatkan produktivitas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

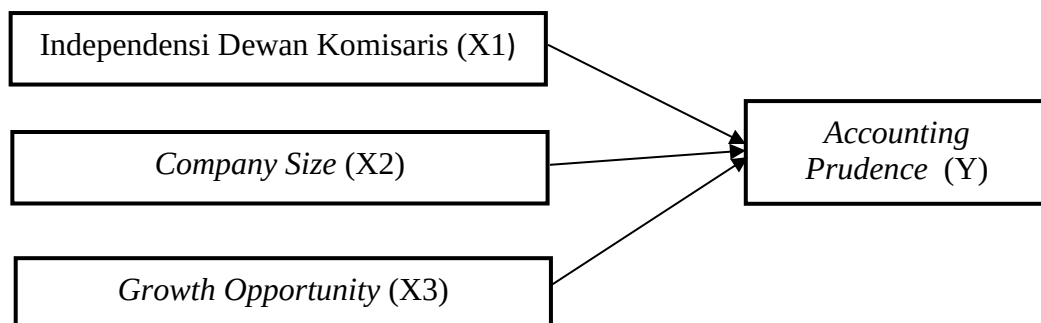
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tafaib & Mulia (2024)	Pengaruh Intensitas Modal, CEO Retirement,	Intensitas modal dan Retirement berpengaruh terhadap <i>prudence</i> , serta

		dan <i>Growth Opportunity</i> Terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi	<i>growth opportunity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>prudence</i> .
2.	Susanto & Suwarno (2024)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Intensitas Modal Terhadap Konservatisme Akuntansi	Kepemilikan manajerial dan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap konservatisme sedangkan komite audit dan intensitas modal berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
3.	Silva Miladia <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, <i>Growth Opportunity</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Prudence Accounting</i>	Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>prudence</i> . sedangkan ukuran perusahaan, <i>growth opportunity</i> , dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>prudence</i> .
4.	Rizki <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh <i>Growth Opportunity</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi Pada Perusahaan BUMN	Dapat disimpulkan bahwa <i>Growth Opportunity</i> , Komisaris Independen Komisaris Independen dan Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi.
5.	Meisy & Mayangsari, (2022)	Pengaruh Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Prudence</i>	Dapat disimpulkan bawa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>prudence</i> . Kemudian independensi dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>prudence</i> .
6.	Usbah & Primasari, (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Growth Opportunity</i> , Profitabilitas	Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, <i>growth opportunity</i> , dan <i>financial distress</i> berpengaruh

		dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Prudence</i>	terhadap <i>prudence</i> . sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>prudence</i> .
7.	Saragih & Rohman (2019)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi	Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>prudence</i> . kemudian independensi dewan komisaris dan tipe auditor berpengaruh terhadap <i>prudence</i> .

2.7 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yaitu *accounting prudence* dan variabel independen yaitu independensi dewan komisaris, *company size*, dan *opportunity growth*. Adapun hasil uraian tersebut maka peneliti membuat kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.8 Bangunan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap *Accounting Prudence*

Komisaris independen dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Penelitian Liyanto & Hairul Anam (2019) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau

yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Sifat independen ini memastikan bahwa komisaris dapat bertindak secara objektif dalam memastikan dan mengawasi jalannya tata kelola perusahaan, sehingga mampu memberikan penilaian yang tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan.

Komisaris independen memiliki pengaruh besar dalam penerapan *accounting prudence* karena komisaris independen memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajemen dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi. Manajemen laba sering kali terjadi ketika perusahaan berusaha untuk mempercantik laporan keuangan mereka dengan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda pengakuan beban. Untuk meminimalisir tindakan tersebut, komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi praktik akuntansi perusahaan dan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara hati – hati sehingga tidak ada manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan para penggunanya. Dengan pengawasan yang objektif dan akuntabilitas, komisaris independen menjadi kunci dalam menjaga stabilitas jangka panjang perusahaan serta melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Dewan komisaris yang independen dari perusahaan mendorong dewan komisaris untuk mengawasi kegiatan manajemen dan mempengaruhi penerapan *accounting prudence* lebih efektif (Maulana *et al.*, 2023).

Sejalan dengan penelitian Meisy & Mayangsari (2022) dan Saragih & Rohman (2019) yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap penerapan *accounting prudence*. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

H1 : Independensi Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Accounting Prudence*

2.8.2 Pengaruh *Company Size* Terhadap *Accounting Prudence*

Company Size atau biasa disebut sebagai ukuran perusahaan adalah indikator dalam menghitung seberapa besar nilai asset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat

berdasarkan total penjualan, total nilai aset, jumlah tenaga kerja dan sebagainya dimana jika semakin besar nilainya maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan (Silva Miladia *et al.*, 2023). Total aset merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mengukur *company size* karena mencerminkan semua sumber daya atau kekayaan sebuah perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi pula keuntungannya (Abbas & Hidayat, 2022). Ukuran perusahaan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Klasifikasi ini biasanya didasarkan pada berbagai faktor seperti total aset perusahaan, jumlah karyawan, serta jumlah pendapatan tahunan perusahaan. Dalam konteks mengenai profitabilitas, sering kali perusahaan besar akan menghadapi risiko yang lebih besar karena berbagai faktor seperti kompleksitas operasional serta persaingan yang ketat. Namun, hal tersebut sebanding dengan potensi risiko yang besar karena perusahaan besar memiliki potensi yang besar pula untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil (Susanti & Bawono, 2024).

Sering kali ukuran perusahaan dijadikan sebagai indikator utama dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Ukuran perusahaan berperan penting terhadap penerapan prinsip *accounting prudence* dalam pengambilan keputusan. Perusahaan dengan skala besar akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta mengelola risiko karena perusahaan besar memiliki akses pendanaan yang lebih mudah, pengawasan yang ketat, serta pengelolaan perusahaan yang baik. Begitupun sebaliknya, perusahaan dengan skala kecil cenderung lebih sensitif terhadap risiko yang lebih besar karena keterbatasan sumber daya dan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, *company size* memiliki pengaruh penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan mampu menerapkan prinsip *accounting prudence* dengan lebih baik.

Sejalan dengan penelitian Abbas & Hidayat (2022) dan Miladia *et al.*, (2023) bahwa *company size* memiliki pengaruh terhadap penerapan *accounting prudence*. Sehingga hipotesis yang diajukan peneliti yaitu :

H2 : *Company Size* berpengaruh signifikan terhadap *Accounting Prudence*

2.8.3 Pengaruh *Growth Opportunity* Terhadap *Accounting Prudence*

Penelitian Usbah & Primasari (2020) menjelaskan *growth opportunity* merupakan kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi terhadap hal-hal yang dapat menguntungkan perusahaan. Peluang tersebut dapat berupa kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan, memperluas pasarnya, serta pengembangan teknologi. *Growth opportunity* menggambarkan prospek perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan sehingga menjadi faktor yang menarik bagi investor yang menandakan bahwa perusahaan memiliki potensi keuntungan di masa depan.

Perusahaan yang menerapkan *growth opportunity* dengan baik cenderung berhati-hati dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, karena mereka ingin menjaga keberlanjutan dari pertumbuhan yang diharapkan. Perusahaan yang memiliki peluang untuk terus tumbuh cenderung menerapkan prinsip *accounting prudence* dalam menyusun laporan keuangannya, karena dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan investor di masa depan semakin besar sehingga mendorong perusahaan untuk menahan labanya semakin besar (Tafaib & Mulia, 2024). Dengan memanfaatkan *growth opportunity* dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip *accounting prudence* dengan tujuan agar perusahaan mampu bertahan dan selalu tumbuh di masa depan dengan risiko keuangan yang rendah.

Selain itu, perusahaan yang semakin bertumbuh akan menghasilkan laba yang cenderung tinggi karena pertumbuhan bisnis sering kali dikaitkan dengan meningkatnya volume penjualan perusahaan. Namun, pertumbuhan laba yang tinggi juga harus dikelola dengan hati-hati agar perusahaan mampu menjaga kesinambungan jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan mampu memastikan bahwa peningkatan laba bersifat berkelanjutan dalam jangka panjang dan tidak hanya bersifat jangka pendek. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki kesempatan pertumbuhan tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi pula. Sehingga mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip *accounting prudence* (Halim, 2023).

Sejalan dengan penelitian Usbah & Primasari (2020) dan Rachmah & Khomsiyah (2024) bahwa *growth opportunity* berpengaruh terhadap *accounting prudence*. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H3 : *Growth Opportunity* berpengaruh signifikan terhadap *Accounting Prudence*